

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2005; 61).

Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan (Nordiawan, 2006:47). Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Mardiasmo (2005: 63) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan pentingnya anggaran sektor publik yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
- b. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade off*.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat.

Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam

laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan SAP Berbasis AkruaI dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Dari uraian diatas peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mediaty dan Syarifudin (2010) yaitu dalam penelitian ini penulis menggantikan subjek penelitian, peneliti sebelumnya studi kasus pada pemerintah Kabupaten Barru Sul-Sel dan sekarang studi empiris pada pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **“PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH DENGAN BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi dalam hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Penulis

Mampu menambah pengetahuan dibidang Akuntansi Sektor Publik khususnya pemahaman mengenai partisipasi penyusunan anggaran, budaya organisasi, dan komitmen organisasi.

###### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan Aparatur Pemerintah Daerah mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran dan selanjutnya meningkatkannya.

###### b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu stakeholder dalam memantau aktivitas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar penelitian ini akan dituangkan dalam 5 bab pembahasan, adapun sistematika pembahasan yaitu :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini disajikan penulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori, penjelasan teori kontinjensi, partisipasi anggaran, kinerja aparat pemerintah daerah, budaya organisasi, dan komitmen organisasi, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi ruang lingkup penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi sampel dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengujian kualitas data, pengujian hipotesis.

### **4. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum pelaksanaan penelitian, hasil uji kualitas data pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil.

## 5. BAB V : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga akan diperoleh kesimpulan akhir dari penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya serta implikasi penelitian.